

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah lama dipahami memiliki peran signifikan bagi pembangunan ekonomi suatu negara (Audretsch, Van der Horst, Kwaak, dan Thurik, 2009). Termasuk di Indonesia sendiri, UMKM terbukti memiliki peranan yang sangat potensial dalam perekonomian nasional seperti mengurangi tingkat kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja. Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) pada tahun 2017 menunjukkan bahwa kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja sebanyak 97,02% dari seluruh tenaga kerja di Indonesia. Yang selama perkembangannya dari tahun 2016 hingga 2017 sebesar 3,41%. Tidak hanya itu, data tahun 2017 menyatakan kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang sekitar 60%, dengan kata lain perkembangan tahun 2016 hingga 2017 sebesar 9,92%. UMKM dipercaya sebagai unit untuk mendukung perekonomian. Hal tersebut dapat terlihat dari perhatian pemerintah untuk terus mengembangkan kemampuan UMKM, agar memperoleh akses dari lembaga keuangan dengan terbuka serta meniadakan hambatan terhadap akses memperoleh jasa lembaga keuangan.

Hal tersebut membuktikan survei yang dilakukan Kemenkop UKM membuktikan bahwa kemampuan bersaing UMKM di Indonesia sudah cukup baik. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa signifikan antara perkembangan UMKM

dan pembangunan ekonomi yang terus meningkat, serta kesejahteraan masyarakat yang membaik. Selaras dengan hal tersebut, masyarakat akan terdorong oleh potensi dana yang dimiliki masyarakat untuk diinvestasikan. Namun perlu diingat, potensi tersebut tidak diimbangi dengan pengetahuan masyarakat seperti berkemampuan mengelola data keuangan dan produk-produk jasa keuangan. Penelitian Siagian (2007) memaparkan bahwa sekitar 90% pelaku usaha di Indonesia umumnya, belum mempunyai kemampuan untuk memahami pengetahuan serta keterampilan untuk mengelola sumber daya keuangan untuk mencapai kesejahteraan.

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memperkaya pengetahuan pelaku UMKM terhadap literasi finansial (*financial literacy*) sehingga pengelolaan dan akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan dengan lebih baik seperti layaknya perusahaan besar. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fatoki (2014), literasi finansial akan berpengaruh secara positif terhadap kemampuan dalam pengambilan keputusan keuangan dan kesejahteraan rumah tangga perusahaan serta keberlangsungan perusahaan. Menurut Anggota Dewan Komisiner bidang edukasi dan perlindungan konsumen OJK Kusumaningtuti S. Soetino yang diambil dari situs OJK yakni [ojk.go.id](http://ojk.go.id), literasi finansial sendiri terdiri dari pengetahuan, keterampilan dan keyakinan. Dalam hal tersebut pengetahuan salah satu contohnya, masyarakat diharapkan akan dapat menambah ilmu dan belajar mengelola usahanya secara langsung dan lebih efektif. Begitupula dalam keterampilan, masyarakat dapat merasakan manfaat ataupun resiko dari pengelolaan usaha terutama jasa keuangan yang dilakukan secara mandiri.

Kemudian keyakinan masyarakat, yakni akan mempercayai atau memiliki keinginan dalam menggunakan produk jasa keuangan tersebut.

*Organisation for Economic Co-operation and Development/International Network on Financial Education* (OECD/INFE 2009) mengemukakan kekurangan literasi finansial diakui sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap keputusan keuangan yang minim informasi sehingga menimbulkan dampak negatif. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia yang dilakukan OJK pada tahun 2016 menunjukkan hanya 29,66% masyarakat Indonesia yang memiliki literasi finansial yang baik. Sedangkan tingkat literasi finansial pada kelompok UMKM hanya sebesar 15,68%. Oleh karena itu, di Indonesia sendiri literasi finansial telah menjadi salah satu fokus kebijakan pemerintah dan lembaga keuangan. Dengan adanya perhatian khusus terhadap literasi finansial, menjelaskan sesuatu usaha demi terciptanya masyarakat yang berkualitas dan memiliki kecerdasan finansial yang baik maka pemahaman akan literasi keuangan semakin diperlukan.

Bicara soal finansial di era modern saat ini, penggunaan teknologi dengan pesat memenuhi kebutuhan manusia. Seiring berjalannya waktu perkembangan teknologi tidak dapat dibendung oleh khalayak seperti tidak terbatas di era digital sekarang ini. Manusia sangat terbantu dengan kehadiran teknologi yang merubah sistematis serta mobilitas menjadi semakin cepat. Berbagai bidang termasuk finansial, kini memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu untuk mendapatkan sebuah layanan. Pemanfaatan teknologi yang bergerak dibidang finansial, yang biasa disebut *Financial Technology (Fintech)*. *Fintech* yang merupakan salah satu

inovasi di bidang financial yang mengacu pada teknologi modern (Chrismastianto, 2017). Model keuangan baru ini, yakni *fintech* dimulai pertama kali pada tahun 2004 oleh Zopa, yaitu institusi keuangan di Inggris yang menjalankan jasa peminjaman uang dan dilanjutkan dengan Bitcoin yang digagas oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008.

*Fintech* berkembang di berbagai sektor, mulai dari startup pembayaran, peminjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel, pembiayaan (*crowdfunding*), remitansi, riset keuangan, dan lain-lain. Tetapi layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia, diantaranya yaitu *payment gateway*, dompet digital (*digital wallet*), manajemen kekayaan (*wealth management*), peminjam (*leanding*) seperti *Peer to Peer* (P2P) *lending* dan *payday loan*, serta pembiayaan sosial (*social crowd funding*).

Schulte and Liu (2018) berbicara soal *fintech*, yakni berubahnya menjadi bidang yang lebih besar dari *Internet of Thing* dan akan berubah secara eksponensial dalam dekade mendatang dengan komputasi kuantum. Kelas aset dan teknologi baru sedang dibuat yang akan mengubah praktik bisnis saat ini. Hal ini memang nyata terjadi pada era modern ini dengan berbagai inovasi baru. Data membuktikan bahwa menurut Asosiasi FinTech Indonesia (*AFTech*), kini perusahaan tergabung di asosiasi *fintech* sudah mencapai 178 *start-up*. Kehadiran *fintech* tak dipungkiri memang telah mendisrupsi sektor perbankan. Namun, ini diyakini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, OJK dan Bank Indonesia (BI) memang sepakat kehadiran *fintech* akan meningkatkan 75% populasi negara terhadap literasi dan inklusi keuangan.

Dari data dan antusiasme masyarakat, memang industri *fintech* Indonesia menjadi salah satu primadona yang menarik perhatian begitu besar dari para pelaku industri keuangan. Salah satunya yang tertarik dengan kehadiran *fintech* ini adalah UMKM. Kemenkop UKM melansir sebanyak 3,79 juta UMKM sudah memanfaatkan *platform* online dalam memasarkan produknya. Jumlah ini berkisar 8% dari total pelaku UMKM yang ada di Indonesia, yakni 59,2 juta. Kerjasama antara para penyedia layanan *fintech* dengan UMKM menjadi pen jembatan yang baik bagi masyarakat terpencil. Menggunakan layanan keuangan yang berbasis teknologi, tanpa harus menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan layanan keuangan.

Bukan hanya di bidang pendanaan dan peminjaman seperti yang sebelumnya dibahas, usaha lain yang bergerak di bidang *fintech* para *platform* yang dinamai *E-Wallet* atau *Digital Wallet*. Yakni alat pembayaran digital yang menggunakan media elektronik berupa *server based*. Pada umumnya *E-Wallet* berupa aplikasi yang berbasis di server dan dalam proses pemakaiannya memerlukan sebuah koneksi terlebih dulu dengan penerbitnya. Penelitian Mulyana dan Wijaya (2018) tentang *E-Payment System Menggunakan Kode QR Berbasis Android* membuktikan, telah memenuhi kriteria yakni bertujuan untuk dapat mempermudah pengguna (*user*) saat melakukan transaksi pembayaran atau transfer. Yang dapat dilihat pada tabel 1.1. Kemudahan transaksi pembayaran atau transfer akan menjadi kurang bermanfaat saat para pedagang (*vendor*) baik Usaha Besar (UB) maupun UMKM tidak melirik prospek usaha yang menjanjikan ini. Karena *user* tidak akan dapat merasakan kemudahan atau kecepatan bertransaksi

menggunakan *E-Wallet*, jika para *vendor* tersebut tidak pernah mengadopsi alat pembayaran *E-Wallet*. Apalagi pada UMKM yang sangat diharapkan sebagai yang memiliki peran penting dan mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia.

**Tabel I.1**  
**Perhitungan Persentase Kuisisioner HolaPay**

<b>Pertanyaan</b>	<b>Nilai Presentase (%)</b>	<b>Keterangan</b>
<b>User Friendly</b>	96,6	Setuju
<b>Respon Time System</b>	90	Setuju
<b>Design</b>	96,6	Setuju
<b>Benefits</b>	86,6	Setuju
<b>Etc (Kapasitas)</b>	90	Setuju

Sumber : *Jurnal E-Payment System Design in E-Wallet Using Android-Based on QR Codes, 2018*

Dari hasil kuisisioner untuk kriteria *user friendly* mendapatkan 96,6% yang dapat dikategorikan bahwa HolaPay aplikasi yang mudah digunakan dan dimengerti. Kemudian kategori *respon time system* mendapatkan 93,3% yang dapat menjelaskan bahwa HolaPay dapat menjalankan sistem dengan waktu yang cepat. Lalu, kategori *design* yang mendapatkan persentase sebesar 96,6% dengan kata lain Holapay tampilannya sangat menarik, kekinian meliputi perpaduan warna, text dan *icon* yang digunakan. Selanjutnya, kriteria *benefits* mendapatkan persentasi 86,6% yang artinya HolaPay dapat menjadi solusi *E-Wallet System* yang masih meliputi mempermudah transaksi, transfer dana, tarik dana, isi ulang (*top up*) saldo dan lain

sebagainya. Terakhir yakni kapasitas memori yang digunakan mendapatkan persentase 90% yang dapat diartikan HolaPay merupakan aplikasi yang ringan tidak memakan banyak ruang memori. Sama halnya dengan aplikasi HolaPay, *platform* lain seperti Go Pay, OVO, LinkAja serta DANA merupakan aplikasi yang telah memenuhi kriteria yakni bertujuan untuk dapat mempermudah pengguna saat melakukan transaksi pembayaran atau transfer.

Pemanfaatan dan perkembangan prospek teknologi digital tersebut tentu harus pula diarahkan kepada sektor UMKM. Selain UMKM yang sangat diharapkan sebagai yang memiliki peran penting dan mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia. Hal lain karena proporsi UMKM tercatat 99,9% atau sebanyak 62,92 juta unit usaha dari total unit usaha di Indonesia. Dalam buku Mulya (2018) yang berjudul Industri Kreatif, Fintech dan UMKM dalam Era Digital, mengatakan bahwa kemampuan UMKM dalam berkontribusi terhadap PDB hanya sebesar 61% dan sebagian besar pengusaha, khususnya yang bergerak di sektor usaha mikro masih berada di bawah garis kemiskinan. Dari jumlah tersebut, lebih dari sepertiga UMKM di Indonesia (36%) masih *offline*, sepertiga lainnya (37%) hanya memiliki kemampuan *online* yang sangat mendasar seperti komputer atau akses *broadband*. Hanya sebagian kecil (18%) yang memiliki kemampuan *online* menengah dengan menggunakan web atau media sosial serta kurang dari sepersepuluh (9%) adalah bisnis *online* lanjutan dengan kemampuan *E-Commerce*.

Menurut Al-Qirim (2013) teknologi internet memungkinkan UMKM untuk dapat menjangkau pasar global yang berarti segmen pasar UMKM tersebut dapat

menjadi lebih besar. Selain itu teknologi internet dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam berkomunikasi baik internal maupun external, baik UMKM maupun pelanggannya akan memperoleh manfaat (Cooper, Seiford, dan Zhu, 2004). Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM dalam mengadopsi teknologi internet berbeda dengan perusahaan besar, terutama menyangkut keterbatasan modal, sumber daya dan pengetahuan teknologi internet. Pada kenyataannya biaya yang diperlukan untuk dapat menggunakan layanan *E-Wallet* adalah murah. Gubernur BI Perry Warjiyo resmi meluncurkan sistem pembayaran digital [QRIS](#) (*Quick Response Indonesia Standard*). QRIS yang diklaim memudahkan dan menguntungkan pelanggan dan pedagang saat bertransaksi yang dapat dipakai oleh seluruh masyarakat. Skema harga QRIS juga beragam tergantung jenis transaksinya. Perry menguraikan, untuk transaksi merchant reguler, persentase *Merchant Discount Rate (MDR) on us* dan *off us* sebesar 0,7%.

Oleh karena itu penelitian tentang UMKM dipandang sangat penting bagi akademisi maupun praktisi bisnis di Indonesia terutama pada bidang teknologi. Mengadopsi *E-Wallet* bagi UMKM merupakan tantangan terbesar karena memiliki beberapa kendala. Berdasarkan hasil penelitian Kemenkop UKM yang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa masalah pendanaan merupakan masalah utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM dan setelahnya adalah permasalahan pemasaran. Selain kedua permasalahan tersebut, permasalahan lain yakni permasalahan bahan baku, kualitas tenaga kerja, dan distribusi transportasi. Dalam penanganan masalahnya pemerintah telah berupaya



memberikan dukungan akses pemasaran bagi UMKM, namun masih belum efektif dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Dilansir dalam situs *CSUL finance*, beberapa penyebab UMKM sulit mendapatkan pendanaan dari para penyedia layanan seperti penyaluran pinjaman modal oleh Bank atau perusahaan keuangan lain adalah (1) persyaratan yang kurang lengkap; (2) kepribadian debitur yang buruk atau riwayat peminjaman yang buruk; (3) kriteria bisnis yang tidak sesuai seperti umur perusahaan yang belum genap 5 tahun; (4) bisnis debitur tersebut masuk ke dalam daftar negatif oleh pihak kreditur yang berarti usaha yang berhubungan dengan penjualan minuman beralkohol, berhubungan dengan asusila, perjudian dan perdagangan barang ilegal; (5) proposal yang diajukan tidak layak; (6) jaminan kredit yang diberikan tidak sesuai; dan (7) membuat proposal dengan presentasi yang buruk seperti membicarakan prospek yang tinggi atau menggunakan yang terlalu canggih.

Dari beberapa penyebab terjadinya penolakan pihak penyedia penyaluran modal oleh Bank atau perusahaan keuangan lain, yang menarik perhatian peneliti adalah persyaratan yang kurang lengkap. Salah satu penyedia layanan peyaluran pinjaman yakni Bank Negara Indonesia (BNI) memberikan persyaratan dan ketentuan untuk dapat melakukan pinjaman. Tertera pada situs BNI Kredit Usaha Rakyat sebagai berikut:

1. Warga Indonesia (WNI)
2. Usaha telah berjalan minimal 6 bulan

Persyaratan yang harus dipenuhi (sesuai *checklist*)

**Tabel I.2**  
**Persyaratan Dokumen BNI Kredit Usaha Rakyat**

Jenis Dokumen	Perorangan	Badan Usaha
Fotokopi KTP el (E-KTP) dan Kartu Keluarga	V	V
Fotokopi surat nikah (bagi yang sudah menikah)	V	
Surat izin usaha (SIUP, TDP, SITU, HO) atau keterangan usaha dari kelurahan/kecamatan	V	V
Fotokopi dokumen jaminan utuk kredit di atas Rp 25 juta*	V	V
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk kredit diatas Rp 50 juta	V	V

(\*) Bukti kepemilikan tanah, IMB dan PBB, BPKB

Sumber : situs [bni.co.id](http://bni.co.id)

Mengingat untuk mendapatkan persyaratan seperti surat izin usaha adalah memerlukan pembukuan atau neraca perusahaan. Sementara para pelaku UMKM sendiri masih banyak yang belum melakukan pembukuan atau neraca perusahaan yang baik. Seperti yang diketahui, bahwa *E-Wallet* sendiri akan melakukan semua pencatatan transaksi dalam bentuk harian dari semua kegiatan transaksi jual-beli yang telah terjadi. Hal ini akan mempermudah para pelaku UMKM mendapatkan pembukuannya sementara jika dibutuhkan akses mendapatkan penyaluran pinjaman pun akan semakin mudah didapatkan karena telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Masalah utama dari pendanaan untuk UMKM yang terjadi bisa diatasi seiring pengadopsian *E-Wallet* ini terlaksana dengan bijak dan baik.

Sementara itu, jangkauan yang jauh dari daerah perkotaan memungkinkan para pedagang UMKM belum dapat beradaptasi dengan penggunaan layanan *E-Wallet* ini. Namun, peneliti melihat beberapa pedagang UMKM di kawasan kelurahan Rawamangun Jakarta Timur belum mengadopsi *E-Wallet* maupun QRIS sebagai alat bantu pembayaran. Jika dilihat pada kawasan kelurahan Rawamangun termasuk daerah perkotaan dengan mobilitas yang cukup tinggi. Dari data BPS bahwa tiga kota administrasi yang memiliki proporsi jumlah usaha lebih dari 20% terhadap total. Yakni, Jakarta Barat dengan jumlah usaha terbesar yaitu 322.049 usaha atau mencapai 26,06%, lalu Jakarta Timur dengan perolehan 21,59% dan Jakarta Selatan sekitar 20,05%. Peneliti melihat prospek baik untuk para pedagang UMKM mengadopsi layanan *E-Wallet* di kawasan kelurahan Rawamangun. Selain dekat dengan pusat kota, kecepatan akses dan informasi lebih mudah didapatkan untuk kelancaran penggunaan *E-Wallet*.

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merasa sangat tertarik untuk meneliti serta merujuk pada beberapa hasil studi empiris terdahulu mengenai literasi finansial UMKM ini. Mengingat kemudahan, keamanan dan kecepatan yang ditawarkan oleh penyedia layanan *E-Wallet* membuat penulis ingin mengetahui hal yang membuat para pelaku UMKM masih enggan mengadopsi *E-Wallet* sebagai alat pembayaran. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Literasi Finansial Pelaku UMKM di Kelurahan Rawamangun Jakarta Timur.**

## 1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti memfokuskan penelitian ini dalam hal literasi finansial dengan bantuan pengadopsian *E-Wallet* serta pemakaian sistem QRIS untuk resistensi UMKM di kelurahan Rawamangun Jakarta Timur.

## 1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian diatas, maka pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana literasi finansial dapat menentukan resistensi kegiatan UMKM di kelurahan Rawamangun Jakarta Timur?
2. Mengapa para pelaku kegiatan UMKM di kelurahan Rawamangun Jakarta Timur belum mengadopsi *E-Wallet* sebagai alat bantu pembayaran?
3. Mengapa para pelaku kegiatan UMKM di kelurahan Rawamangun Jakarta Timur belum menggunakan QRIS sebagai alat bantu pembayaran?

## 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, manfaat dari penelitian ini sebagaimana yang diharapkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai motivasi dan sumber ide dalam meningkatkan kinerja pada UMKM di masa yang akan datang serta bisa dijadikan referensi penelitian yang akan datang.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai penelitian dan saran dalam mengambil sebuah keputusan atau kebijakan dalam meningkatkan potensi maupun eksistensi para pelaku UMKM.

### b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan informasi serta dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya khususnya terkait dengan literasi finansial pada UMKM.

### c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan serta sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam upaya untuk menetapkan kebijakan serta pengembangan pada UMKM.

